

# **PEMBERDAYAAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT**

## ***(Volunteer Empowerment to Improve Social Resilient)***

Etty PADMIATI

**Abstract.** Empowering volunteers should be seen as a recognition to their role on developing communities improving their social performance after receiving training intervention, this article attempts to present research result from Lembang, a subdistrict Bandung. This study shows that the volunteers skills improvement has a positive impact on improving social resilient, through the acceleration of social change at the community level.

**Key words:** Empowerment, Volunteers, Pendampingan, Stimulan

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi perubahan sosial yang ditandai dengan krisis multi dimensional yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasi tersebut tampak jelas ditandai oleh tumbuhnya berbagai gerakan masyarakat lokal yang mengarah pada gejala disintegrasi. Kondisi tersebut bila tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan masalah yang lebih luas. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, sehingga masyarakat harus mampu mempertahankan diri dan mengatasi masalah sendiri. Fenomena tersebut merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan secara tuntas.

Departemen Sosial sebagai penanggungjawab pelaksana pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tidak dapat sepenuhnya melaksanakan sendiri usaha kesejahteraan sosial. Untuk itu peran aktif masyarakat menjadi sangat penting, sebab ketahanan sosial masyarakat tanpa mendapat dukungan masyarakat adalah mustahil dapat terwujud. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi, kesetiakawanan, dan tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar. Adapun peran serta masyarakat tersebut baik dalam rangka mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) maupun dalam usaha menggali sumber-sumber yang diperlukan untuk usaha kesejahteraan tersebut.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) merupakan salah

satu komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Departemen Sosial dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. TKSM sebagai agen ketahanan sosial masyarakat dapat dianggap sebagai modal sosial yang berfungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana usaha kesejahteraan sosial berbasis lokalitas. Tugas tersebut merupakan instrumen strategis dalam menciptakan derajat ketahanan sosial masyarakat yang kokoh, kuat dan dapat diandalkan

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial tahun 2002, jumlah TKSM ada 384.890 orang, terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 271.539 orang dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 113.351 orang. Diperkirakan baru sekitar 20 % yang pernah diberdayakan. Di samping itu, tidak semua TKSM memiliki kemampuan yang memadai, sedangkan dipihak lain belum semua daerah memperdayakan TKSM sebagai mitra kerja dalam UKS. Hal ini juga terungkap dari hasil kajian Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbangtansosmas) Balatbangsos pada tahun 2002, bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kinerja TKSM, karena lemahnya pengetahuan dan kemampuan mereka untuk mengelola UKS berbasis masyarakat secara memadai. Kondisi yang demikian menyebabkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial belum dapat ditangani secara maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu diupayakan pemberdayaan bagi TKSM dalam usaha kesejahteraan sosial yaitu melalui bimbingan sosial untuk meningkatkan kemampuan dalam memperkuat kinerjanya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang

aplikabel, TKSM diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

## 1.2. Kerangka Pemikiran

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan, komitmen kesejahteraan sosial, dan telah mengikuti program pendidikan dan latihan kesejahteraan sosial. Atau dapat dikatakan bahwa TKSM adalah warga masyarakat yang telah mengikuti proses bimbingan sosial dan latihan bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial.

Termasuk kategori TKSM adalah,

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yaitu warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial (Kepmensos RI No.28/HUK/1987).
2. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, yaitu wanita/tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (Kepmensos RI No.23/HUK/1996).

Dalam kegiatannya sehari-hari TKSM banyak membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, dan mencegah timbulnya masalah-masalah sosial di lingkungannya. Dengan demikian, TKSM merupakan salah satu komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja

Departemen Sosial dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

TKSM secara khusus mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan bidang tugas pengabdianya dalam rangka menjembatani aspirasi warga masyarakat setempat dan komunitas luar, yang dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TKSM mempunyai peranan sebagai motivator, dinamisator, maupun pelaksana UKS yang dilakukan secara sinergis.

Sebagai motivator berarti memotivasi masyarakat dan lingkungannya, sehingga mereka sadar, mau dan mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembangunan, terutama pembangunan kesejahteraan sosial. Di samping itu, motivator berarti menemukan potensi permasalahan kesejahteraan sosial serta sumber daya maupun dana di masyarakat yang dapat digali, diarahkan dan dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya, sebagai motivator TKSM juga merumuskan langkah-langkah mengatasi masalah kesejahteraan sosial sesuai kebijaksanaan pemerintah.

Sebagai dinamisator berarti berpikir dan bertindak dinamis menggerakkan, mengerahkan dan mengarahkan baik terhadap perorangan, keluarga, masyarakat maupun pilar pembangunan masyarakat di lingkungannya dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara berencana, terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

Sedangkan sebagai pelaksana tugas-tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial, TKSM melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang UKS secara profesional, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak manapun. Di samping itu, melaksanakan kegiatan UKS berdasarkan inisiatif dan swadaya TKSM sendiri.

Sebagai mitra kerja pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial, TKSM telah banyak kontribusinya sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Dengan demikian sesungguhnya TKSM merupakan investasi sosial bagi pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan untuk penyelesaian permasalahan sosial. Sehubungan dengan itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan TKSM melalui penguatan dan peningkatan kemampuan mereka agar mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan TKSM dalam menjalankan peran dan tugasnya bila mereka mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik kemampuan manajemen maupun keterampilan teknis pelayanan sosial, serta kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait maupun masyarakat.

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong/memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan yang dimiliki tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh David C. Korten (1998) bahwa pemberdayaan (*empowering*) adalah pemberian kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya bagi kepentingan masyarakat. Pendapat lain mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya menstimuli, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (AMW Pranarka dan Vindyandika Moeljarto, 1994). Mengacu pada pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dalam konteks tulisan ini adalah pemberian kesempatan, kewenangan dan kemampuan kepada TKSM untuk menggali dan mengembangkan sumber daya dan dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya. Dengan demikian pemberdayaan TKSM tidak lain adalah suatu upaya penguatan kepada TKSM, sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal. Adapun salah satu upaya pemberdayaan bagi TKSM adalah melalui pendidikan, kongkritnya berbentuk bimbingan sosial.

Bimbingan sosial adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis untuk membimbing dan mengarahkan TKSM dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, sehingga dapat melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, bimbingan sosial bagi TKSM ini lebih diarahkan pada upaya :

1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan.

2. Peningkatan relasi dalam upaya pengembangan masyarakat sehingga ada motif untuk maju.

3. Pembinaan potensi dan peran.

Bimbingan sosial bagi TKSM dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat haruslah responsif terhadap kebutuhan dan didasarkan pada kompetensi serta menjadikannya sebagai masyarakat belajar. Masyarakat belajar atau "*learning society*" adalah kondisi yang menjamin terjadinya proses saling belajar antar TKSM dalam menjalankan berbagai peranannya. Bimbingan sosial memberikan peluang bagi TKSM untuk saling belajar, saling mengisi dan saling melengkapi

Freire (dikutip oleh Mulia Astuti, 2003) menawarkan pendekatan "*learning by experience*" berdasarkan kesepakatan kontrak pembelajaran dalam setiap proses, atau dengan kata lain pendidikan orang dewasa yang lebih efisien. Pendidikan orang dewasa menekankan pada prinsip pembelajaran dan pengajaran yang responsif dan partisipatif. Prinsip umum pembelajaran yang seharusnya menjadi pedoman adalah (a) kesiapan peserta untuk belajar, (b) pemecahan materi pelatihan dalam bagian-bagian, (c) pemahaman, (d) partisipasi, (e) hadiah atau pujian, dan (f) praktek. Sedangkan prinsip umum pengajaran mencakup (a) kesalahan peserta sebagai kesempatan untuk membimbing, (b) membantu peserta menelaah kebutuhannya, (c) melibatkan peserta dalam proses belajar, (d) memanfaatkan pengalaman peserta (memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan diri), (e) mengaitkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata, dan (f) secepatnya menerapkan hasil belajar.

Untuk melaksanakan prinsip ini, maka materi bimbingan yang disajikan adalah materi yang harus dikuasai peserta (*the must know*), materi penunjang (*the should know*) dan materi yang disajikan untuk memperkaya pengetahuan peserta (*the must know*). Metode bimbingan sosial dapat dilakukan melalui penyajian diikuti pembahasan, diskusi kelompok, kasus, permainan peranan, latihan, praktek lapangan, penugasan, dan lain-lain. Penggunaan metode bimbingan tentunya disesuaikan dengan tujuan dan bobot materi yang disajikan, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Keberhasilan bimbingan sosial ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah tujuan yang dirumuskan, ketepatan peserta dan kualifikasi fasilitator, penyajian materi, penggunaan metode serta alat bantu.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa jika bimbingan sosial dilakukan secara efektif, maka TKSM dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, maka setiap TKSM dapat memanfaatkan materi yang disajikan dan pada akhirnya mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya (Betke, 2002). Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Kemampuan di sini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi di dalamnya ada unsur dinamik yaitu kemampuan

untuk segera kembali kepada kondisi semula atau bahkan lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Jadi ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan (Mu'man Nuryana, 2002).

Konsep ketahanan sosial masyarakat (Pusbangtansosmas, 2002) adalah suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mengelilinginya. Suatu komunitas memiliki tingkat ketahanan sosial bila: *pertama*, mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya. *Kedua*, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. *Ketiga*, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya ketahanan sosial suatu masyarakat akan ditentukan oleh efektif tidaknya mereka (1) melindungi anggotanya, (2) menanamkan investasi sosial dalam jaringan sosial dan (3) mengelola konflik dan kekerasan.

Untuk merealisasikan kondisi tersebut di atas, TKSM mempunyai peran penting, terutama dalam membantu masyarakatnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial akibat perubahan sosial, menciptakan jaringan-jaringan sosial dan mengelola konflik.

### 1.3. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pemberdayaan TKSM

dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui bimbingan sosial, dan sejauhmana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan sosial tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian lapangan. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengkajian yang diarahkan untuk mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan sosial untuk memberdayakan TKSM dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Adapun lokasinya ditentukan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dari 16 desa yang ada di Kecamatan Lembang, dipilih tiga desa yaitu Desa Cibodas, Suntenaya dan Langensari.

Dalam pemberdayaan TKSM melalui bimbingan sosial ini yang menjadi responden adalah TKSM sebanyak 30 orang yang dinilai masih aktif. Untuk mendapatkan data dan informasi, dilakukan dengan pengamatan dan evaluasi terhadap kegiatan/usaha yang dilaksanakan oleh TKSM. Kemudian juga wawancara mendalam, studi kepustakaan dan sejumlah laporan yang relevan.

## **2. HASIL PENGKAJIAN**

### **2.1. Deskripsi Wilayah**

Kecamatan Lembang adalah salah satu dari 43 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya 97,01 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 127.228 jiwa yang terdiri dari 33.585 KK (data tahun 2002). Dari jumlah penduduk tersebut 78.854 jiwa (61,98%) berusia antara 15 - 56 tahun

yang dapat dikatakan sebagai usia produktif.

Dari penduduk usia produktif tersebut, 34.072 jiwa (43,21%) telah tertampung di lapangan kerja, dan lebih dari separuh yaitu 18.816 jiwa (55,23%) masih mengandalkan bekerja di bidang pertanian. Sedangkan selebihnya sebagai pengrajin (0,11%), buruh industri (6,68%) dan buruh bangunan (3,89%). Kemudian pedagang (18,60%), jasa (0,91%), PNS (6,58%), ABRI (4,91%) dan pensiunan (3,09%). Kenyataan masih banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan gejala yang hampir ada di seluruh daerah pedesaan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih luasnya lahan di daerah pedesaan, sementara lapangan kerja formal sangat terbatas. Satu-satunya alternatif yang paling mungkin dimasuki adalah sektor pertanian yang relatif tidak menuntut persyaratan pendidikan formal tinggi dan keahlian tertentu.

Di kecamatan Lembang ini terdapat 10 jenis PMKS, antara lain : anak terlantar, anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, tuna susila, bekas narapidana, penyandang cacat, keluarga fakir miskin, warga rawan sosial ekonomi, korban bencana alam dan musibah lainnya, serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Dari 10 jenis PMKS tersebut yang terbanyak adalah keluarga fakir miskin.

### **2.2. Pemberdayaan TKSM**

TKSM sebagai mitra kerja pemerintah telah banyak kontribusinya sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Pelibatan TKSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai peran

yang sangat penting dalam motivasi, mendorong prakarsa, memberikan bimbingan, konsultasi baik teknis maupun non teknis dan keterampilan tertentu kepada masyarakat, serta memperkuat dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, TKSM merupakan modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menangani permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Atau dapat dikatakan perannya sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana UKS sangat penting dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan TKSM dalam mewujudkan ketahanan sosial masyarakat perlu diberdayakan melalui bimbingan sosial. Dengan kata lain, bimbingan sosial bagi TKSM akan mampu meningkatkan perannya dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Bimbingan sosial bagi TKSM yang dilaksanakan di Kecamatan Lembang berlangsung selama 8 hari @ 8 jam, yang diikuti oleh 30 orang TKSM dengan kriteria sebagai berikut :

1. Masih aktif mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
2. Berpengalaman minimal tiga tahun.
3. Berpendidikan minimal SLTA.
4. Memahami wilayah kerjanya secara utuh.
5. Sekurang-kurangnya mempunyai satu jaringan atau organisasi yang menjadi mitra kerjanya.

Pelaksanaan bimbingan selain dilakukan di dalam ruangan (kelas), juga di lapangan, yang dalam hal ini

dilakukan secara langsung di masyarakat dalam bentuk peragaan, kunjungan, study banding, dan lain-lain. Metode bimbingan yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab, diskusi, simulasi, permainan peran dan mengutamakan partisipasi peserta.

Untuk memfasilitasi selama bimbingan berlangsung dibutuhkan seseorang yang bertugas sebagai fasilitator. Adapun kualifikasi untuk fasilitator adalah sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan bimbingan sosial.
2. Pendidikan sekurang-kurangnya S1.
3. Memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya.
4. Pernah mengikuti pelatihan pelatih di bidang bimbingan.

Materi bimbingan yang diberikan mencakup aspek yang sangat diperlukan TKSM yaitu yang bersifat umum, inti dan penunjang.

### **2.3. Proses Pelaksanaan Bimbingan Sosial**

Proses pelaksanaan bimbingan sosial bagi TKSM dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### **1. Persiapan**

- a. Penentuan anggota Tim yang akan melaksanakan kegiatan bimbingan.
- b. Penentuan strategi pelaksanaan bimbingan.
- c. Persiapan dan konsolidasi lapangan (membangun kepercayaan masyarakat,

menentukan kontrak kerja, pembentukan tim kerja dan jadwal kegiatan).

- d. Pemantapan (materi, metode pembelajaran dan penyusunan skenario bimbingan sosial).

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan sosial dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan sosial di ruang/kelas

Bimbingan sosial di ruangan/kelas dimulai dengan menu-menu permainan (games) yang disesuaikan dengan materi bimbingan, seperti pengenalan, pembentukan kelompok, komunikasi, kerja sama, dan lain sebagainya. Tujuan dari permainan ini adalah terciptanya suasana akrab antara fasilitator dengan peserta bimbingan, juga antara peserta satu dengan yang lainnya. Kemudian, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok dengan maksud untuk memudahkan koordinasi dan mengintegrasikan rencana kegiatan yang akan disusun. Mengingat peserta berasal dari tiga desa, maka mereka dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok *Maju Jaya* (desa Sunten Jaya), kelompok *Bela Bangsa* (desa Cibodas) dan kelompok *Pelita Sari* (desa Langensari).

Setelah itu, untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan diberikan materi :

- 1) Umum

Berisikan topik-topik yang

bersifat umum, seperti : Konsep Ketahanan Sosial Masyarakat, Profil TKSM, dan Kedudukan TKSM dalam Tansosmas.

- 2) Inti

Berisikan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Materi yang disajikan adalah substansi atau inti kegiatan bimbingan, seperti : Teknik Pendampingan, Identifikasi Masalah dan Sumber, Teknik Pengelolaan Jaringan Kerja dan Kemitraan, Penggalan dan Mobilisasi Sumber. Kemudian Pembahasan Kasus, Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa atau Kelurahan, Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.

- 3) Penunjang

Berisikan muatan penunjang. Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lokal.

- b. Di lapangan (simulasi di masyarakat)

Bimbingan sosial di lapangan merupakan kegiatan praktek lapangan dengan materi yang telah disimulasikan di dalam kelas. Simulasi di masyarakat ini bertujuan agar TKSM memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan sumber secara partisipatif. Dalam simulasi ini peserta bimbingan didampingi oleh fasilitator. Lingkungan yang dipilih adalah di mana TKSM berasal, dan tingkatan wilayahnya adalah Rukun Warga (RW).

Kegiatan yang dilakukan dalam simulasi di lapangan ini adalah :



- Mengidentifikasi masalah, sumber, dan menentukan prioritas masalah, dengan menggunakan Metode Participatory Assesment (MPA).
- Mengadakan pertemuan desa yang dihadiri oleh wakil setiap RW untuk menentukan prioritas masalah desa yang diangkat dari prioritas RW.
- Berdasarkan prioritas masalah tersebut, kemudian disusun rencana kerja masyarakat (community action plan) untuk mengatasi masalah yang menjadi prioritas tersebut.

Pada simulasi di lapangan, rencana kerja masyarakat yang disusun kelompok Maju Jaya dari desa Sunten Jaya adalah pembentukan koperasi. Hal ini dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak yang dirasakan masyarakat yaitu kebutuhan akan modal usaha. Dengan adanya koperasi masyarakat berharap terlepas dari ketergantungannya kepada tengkulak atau rentenir.

Selanjutnya kelompok Bela Bangsa dari desa Cibodas mengusulkan kegiatan simpan pinjam. Program ini diusulkan berdasarkan pada kesulitan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh modal usaha dan memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kegiatan simpan pinjam merupakan kebutuhan yang mendesak dirasakan oleh masyarakat Cibodas.

Kemudian kelompok Pelita Sari dari desa Langen Sari menyusun program berdasarkan prioritas masalah yaitu banyaknya pengangguran. Mereka mengusulkan budi daya tanaman stroberi, karena selain tersedia lahan pertanian untuk digarap para pengangguran juga pada saat ini pemasaran stroberi cukup baik dan nilai jualnya pun cukup tinggi.

c. Pemberian Stimulan

Setelah TKSM selesai mendapatkan bimbingan sosial di kelas maupun di lapangan, maka untuk mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah mereka (kelompok) susun bersama masyarakat tentu memerlukan dukungan/bantuan modal. Sehubungan dengan itu, TKSM diberi bantuan stimulan sebesar Rp10.000.000 untuk tiga kelompok.

d. Pendampingan.

Untuk mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun, selain perlu dukungan dana juga diperlukan pendamping. Dimaksud pendamping di sini adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan bagi TKSM, yang secara terus menerus mengarahkan kelompok-kelompok untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Pendamping tersebut berasal dari lingkungan lokal (bertempat tinggal di wilayah itu) dan dipilih oleh peserta bimbingan sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan sendiri.

Adapun pendamping TKSM dalam kegiatan ini ada dua orang, salah satunya adalah seorang (PSM) yang memiliki predikat PSM teladan se-Kabupaten Bandung.

### 3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana kelompok-kelompok yang telah terbentuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau rencana kerja yang telah direncanakan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah pendekatan partisipatif. TKSM yang mengikuti program bimbingan sosial diundang kembali untuk melakukan evaluasi bersama-sama dengan cara membuka kembali tabel kalender kegiatan yang telah mereka susun.

Tabel kalender tersebut kemudian dipelajari bersama, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, hasil apa yang sudah dicapai, pelaksananya siapa, pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut siapa saja, dan status kegiatan tersebut bagaimana (sukses/gagal).

### 3. HASIL BIMBINGAN

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan pada TKSM. Mereka mengalami peningkatan pengetahuan tentang ketahanan sosial masyarakat serta peran dan tugasnya sebagai agen ketahanan sosial masyarakat. Di samping itu, TKSM pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari antusias mereka mengikuti bimbingan sosial, dan

semangat TKSM bersama masyarakat dalam merealisasikan rencana kerja yang telah mereka susun bersama.

Sedangkan di lapangan beberapa TKSM telah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah mereka susun antara lain :

#### 1. Kelompok Maju Jaya (Desa Sunten Jaya).

Rencana kerja yang diusulkan oleh kelompok ini adalah pembentukan koperasi. Untuk itu kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- a. Mengadakan pertemuan untuk rencana pembentukan koperasi, setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Desa dan mendapat respons baik. Namun sampai kegiatan evaluasi ini dilakukan koperasi yang diusulkan belum terbentuk.
- b. Meskipun koperasi belum terbentuk, kelompok telah berhasil mengumpulkan dana/modal dari 10 orang anggotanya untuk simpanan wajib masing-masing Rp 25.000,- dan simpanan sukarela sebesar Rp 5.000,-.
- c. Karena usaha koperasi belum berjalan, kelompok mengalihkan kegiatan pada usaha pertanian budi daya tanaman stroberi yang beranggotakan 20 orang, dengan modal Rp 1.500.000,- dari dana stimulan yang telah diterima. Hasil yang diperoleh ini akan digunakan untuk menambah modal koperasi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok dalam melaksanakan kegiatannya adalah:

- Belum ada kesepakatan dari anggota tentang besarnya simpanan pokok.
  - Untuk simpanan wajib dan sukarela belum dapat terkumpul
- Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dilakukan adalah:
- Meminta bantuan ke instansi terkait.
  - Mengundang anggota dan memberi penjelasan tentang simpanan pokok, wajib dan sukarela.
  - Simpanan pokok dapat dibayar dua kali.
2. Kelompok Bela Bangsa (Desa Cibodas).
- Rencana kerja yang diusulkan oleh kelompok ini adalah pembentukan kelompok usaha simpan pinjam. Untuk itu kegiatan yang telah dilakukan adalah :
- a. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), LKMD, Badan Pengelola Air Bersih dan Silitasi (BPABS) dan Badan Usaha Milik Desa (Bundes) untuk mendapatkan dukungan dalam membentuk usaha simpan pinjam.
  - b. Membentuk Kelompok Usaha Simpan Pinjam (KUSP) yang diberi nama KUSP "Amanah", dengan jumlah anggota 33 orang dan modal awal sebesar Rp 1.500.000,- berasal dari dana stimulan yang diterima kelompok.
  - c. Sampai saat evaluasi
- dilaksanakan, jumlah anggota telah menjadi 33 orang dengan kekayaan sebesar Rp 13.642.500 yang berasal dari :
- Modal awal Rp 1.500.000
  - Bantuan Bundes Rp 3.500.000
  - Bantuan Raksa Desa Rp 5.000.000
  - Bantuan BPABS Rp 2.000.000
  - Tabungan masyarakat Rp 1.040.000
  - Hasil Usaha Rp 602.500
- Hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok dalam melaksanakan kegiatannya adalah:
- Modal usaha belum memadai.
  - Tempat untuk penyimpanan barang agunan.
- Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, upaya yang dilakukan adalah:
- Membina masyarakat dan murid-murid SD di Cibodas untuk menabung di KUSP "Amanah".
  - Mencari dukungan dari lembaga atau badan yang ada di desa Cibodas.
  - Untuk sementara barang-barang agunan dititipkan di balai desa Cibodas.
3. Kelompok Pelita Sari (Desa Langen Sari).
- Rencana kerja yang diusulkan oleh kelompok ini adalah budi daya tanaman stroberi bagi pengangguran. Untuk itu kegiatan yang telah dilakukan adalah :
- a. Mengadakan pertemuan kelompok, dengan hasil :

- 1) Membentuk kepengurusan kelompok.
- 2) Disepakati adanya pertemuan kelompok satu bulan dua kali.
- 3) Menjalin kerja sama dengan para petani yang telah berhasil.
- b. Mengadakan penyuluhan/ pembinaan dan pelatihan sebanyak tiga kali untuk menambah pengetahuan anggota kelompok tentang bercocok tanam stroberi.
- c. Sampai saat evaluasi dilakukan jumlah anggota yang tadinya 30 orang telah menjadi 45 orang, karena antusias warga masyarakat terhadap kegiatan usaha ini. Mereka yang sudah panen sebanyak 30 orang, rata-rata panen tiga kali dalam seminggu @ 2 kg dengan harga Rp 18.500,- per kg.
- d. Setiap panen anggota menyisihkan Rp 10.000,-. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk membeli bibit, obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok dalam melaksanakan kegiatannya adalah:

- Mengingat kemarau panjang sulit mendapatkan air untuk menyiram tanaman, sehingga hasil yang diperoleh menurun.
- Tidak tetapnya harga.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, upaya yang dilakukan adalah:

- Untuk penanaman selanjutnya menunggu musim hujan.

- Sedang mengusahakan pompa air untuk menyiram tanaman supaya hasilnya lebih baik.
- Mencari tempat pemasaran yang lebih baik.

Dari hasil evaluasi dapat diketahui, bahwa kelompok yang telah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan adalah Kelompok Bela Bangsa dan Pelita Sari. Keberhasilan tersebut karena kekompakan kelompok dan peranan ketua kelompok yang begitu terampil sebagai dinamisator dalam menyelenggarakan kegiatan rencana kerja. Sedangkan kelompok Maju Jaya kurang berhasil karena inisiatif kegiatan hanya berada pada ketua kelompok, padahal ketuanya sudah sepuh dan memiliki keterbatasan mobilitas. Di samping itu, kelompok ini kurang kompak karena ada anggota yang begitu dominan dalam kelompok, maka hasil tidak akan maksimal, sehingga usaha koperasi yang direncanakan sejak awal belum berhasil diwujudkan. Oleh sebab itu untuk sementara mereka mengalihkan kegiatannya pada usaha pertanian dengan budi daya stroberi.

---

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kajian di lapangan tentang pemberdayaan TKSM dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui bimbingan sosial, dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### 4.1. Simpulan

1. Upaya pemberdayaan TKSM dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui bimbingan sosial dilaksanakan menggunakan

pendekatan partisipatif. Maksudnya peserta bimbingan memiliki kesempatan yang luas untuk berinisiatif, berinovatif dan berkreasi untuk menciptakan kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

2. Pelaksanaan bimbingan sosial bagi TKSM ini juga memandang TKSM dan masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan evaluator, sehingga TKSM bersama masyarakat dapat mengidentifikasi masalah dan mengakses sistem sumber yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
3. Setelah bimbingan sosial bagi TKSM dilaksanakan, dari hasil evaluasi terlihat kondisi masyarakat sudah menunjukkan adanya perubahan-perubahan dalam hal ketahanan sosial masyarakat, yang ditandai dengan lebih mampu melindungi anggota masyarakatnya dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran.
4. Beberapa TKSM sudah mampu memobilisasi sistem sumber, membangun dan mengembangkan jaringan sosial dalam mendukung ketahanan sosial masyarakat. Jaringan yang sudah dibangun dan dikembangkan antara lain dengan aparat desa setempat, badan usaha masyarakat setempat, dan lain sebagainya.
5. Masih ada kelompok yang belum menunjukkan perubahan ke arah peningkatan ketahanan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat di wilayah tersebut belum melaksanakan rencana

kegiatan yang mereka susun, bahkan cenderung memunculkan konflik antara pemerintah lokal dengan TKSM yang memperoleh bimbingan sosial.

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Bimbingan sosial yang diterapkan harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih mempercepat terjadinya perubahan sosial di tingkat lokal.
2. Agar rencana kerja yang disusun dapat dilaksanakan, maka pemilihan ketua kelompok harus betul-betul diperhatikan, sebab mereka memiliki peranan yang cukup penting dalam menyelenggarakan program aksi. Mereka harus benar-benar memiliki komitmen yang tinggi, karena hanya dengan penuh pengabdian dan motivasi, program kegiatan bisa terealisasi.
3. Selama TKSM melaksanakan program kerjasama dengan masyarakat, dibutuhkan pendamping yang akan memotivasi kerja mereka. Untuk itu pemilihan pendamping hendaknya yang benar-benar menguasai materi bimbingan sosial, sehingga apabila TKSM dan masyarakat mengalami hambatan dalam merealisasikan program, pendamping bisa mengarahkan membimbingnya.

**PUSTAKA ACUAN**

- AMW Pranarka dan Vindyandika Moeljarto, (1994). *Pemberdayaan Konsep dan Implementasi*, Jakarta : CSIS.
- David C Korten, (1988). *Community Management (Asian Experience and Perspectives)*, Kumarian Press West Hartford, Connecticut.
- Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan, (2003). *Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)*, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- , (2003). *Kiat Memberdayakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)*, Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- Ginjar Kartasmita, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Cides.
- Mulia Astuti, dkk, (2003). *Model Bimbingan Sosial Bagi TKSM Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pengembangan Konsep dan Uji Coba)*, Jakarta : Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Balatbangsos.
- Mu'man Nuryana, dkk, (2002). *Membangun Konsepsi dan Strategi ketahanan Sosial Masyarakat*, Jakarta: Pusat Ketahanan Sosial Masyarakat, Balatbangsos.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, (2002). *Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.